

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja
Utara)**

***ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING THE QUALITY OF
FINANCIAL REPORT OF LOCAL GOVERNMENT WITH
INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AS MODERATION VARIABLES
(Case Study on Regional Apparatuses of Toraja Utara
Regency)***

**MILKA PADANG
A0622110035**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja
Utara)**

***ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING THE QUALITY OF
FINANCIAL REPORT OF LOCAL GOVERNMENT WITH
INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AS MODERATION VARIABELS
(Case Study on Regional Apparatuses of Toraja Utara
Regency)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi
disusun dan diajukan oleh

**MILKA PADANG
A0622110035**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara)

Disusun dan diajukan oleh

MILKA PADANG
A062211035

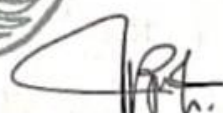
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

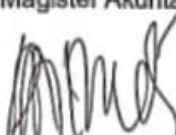
Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP. 196604051992032003


Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si.
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Milka Padang
NIM : A062211035
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi
Jenjang : Magister (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



PRAKATA

Syalom, salam sejahtera..

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara)**. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Studi Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA, Bapak Prof. Dr. Asri Usman, SE.,Ak.,M.Si.,CA, dan Bapak Muh. Irdam, SE., M.Acc., Ph.D. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Toraja Utara yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian. Serta tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan

mahasiswa magister kelas A prodi Akuntansi angkatan 2021. Untuk segala bantuan yang tak terhingga kepada penulis.

Terakhir, Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada ibundaku tercinta Ludia Rappa Kambuno, serta kakak-kakak tercinta Ritael Kambuno, Reski Kambuno, Melda Padang dan adik Joyo Kambuno yang senantiasa menyertai peneliti dengan doa dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang kepada peneliti selama ini.

Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Tuhan Yesus Memberkati..

Makassar, 1 Juli 2023

Peneliti,

Milka Padang

ABSTRAK

MILKA PADANG. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. Penelitian ini dilakukan di 28 Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik sensus/survey karena semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian sehingga jumlah sampel sebanyak 84 orang. Teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori institutional dan teori stewardship. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Untuk menguji hipotesis, digunakan metode statistik moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) sistem pengendalian internal dapat memperkuat hubungan antara standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan (4) komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintah, peran internal audit, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan



ABSTRACT

MILKA PADANG. *An Analysis of Factors Affecting the Quality of Financial Report of Local Government with Internal Control System and Organizational Commitment as Moderation Variables* (supervised by Andi Kusumawati and Darmawati)

This study aims to analyze the effect of government accounting standards and the role of internal audit on the quality of local government financial reports moderated by internal control systems and organizational commitment. This research was conducted in 28 regional areas of North Toraja Regency by using quantitative research method. Determination of the sample used census/survey technique, in which all members of the population were used as research samples, consisting of 84 people. This study used institutional theory and stewardship theory. The data consisted of primary data obtained using questionnaires. Statistical method used to test the hypothesis was Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of SPSS version 22. In conclusion (1) government accounting standards have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports; (2) the role of internal audit has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports; (3) internal control system can strengthen the relationship between government accounting standards and the quality of local government financial reports, (4) organizational commitment can strengthen the relationship between the role of internal audit and the quality of local government financial reports. The results of this study can be useful for the government of North Toraja Regency to always strive to improve quality in the preparation and presentation of financial reports.

Keywords: government accounting standards, the role of internal audit, internal control systems, organizational commitment, quality of financial reports.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 <i>Institutional Theory</i>	14
2.1.2 <i>Stewardship Theory</i>	16
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan	18
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah.....	21
2.1.5 Peran Internal Audit.....	25
2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	27
2.1.7 Komitmen Organisasi	30
2.2 Tinjauan Empiris.....	32
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	36
3.1 Kerangka Pemikiran	36
3.2 Hipotesis	37
3.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	37
3.2.2 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	39
3.2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	40
3.2.4 Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan	42
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Rancangan Penelitian	45
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	45
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknis Pengambilan Sampel	45
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	47
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	47

4.6	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	48
4.6.1	Kualitas Laporan Keuangan	48
4.6.2	Standar Akuntansi Pemerintah	49
4.6.3	Peran Internal Audit.....	50
4.6.4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	50
4.6.5	Komitmen Organisasi	51
4.7	Instrumen Penelitian.....	53
4.8	Teknik Analisis Data.....	54
4.8.1	Statistik Deskriptif.....	54
4.8.2	Uji Instrumen	54
4.8.2.1	Uji Validitas	54
4.8.2.2	Uji Realibilitas	54
4.8.3	Uji Asusmsi Klasik.....	55
4.8.3.1	Uji Normalitas	55
4.8.3.2	Uji Multikolinearitas	55
4.8.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.8.4	Uji Hipotesis	56
4.8.4.1	Uji Koefisien Determinasi	57
4.8.4.2	Uji Parsial (<i>t-test</i>)	57
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	59
5.1	Deskripsi Data	59
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian	62
5.2.1	Pengujian Kualitas Data	64
5.2.1.1	Hasil Uji Validitas	65
5.2.1.2	Hasil Uji Reliabilitas	74
5.2.2	Pengujian Asumsi Klasik	74
5.2.2.1	Hasil Uji Normalitas.....	74
5.2.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	75
5.2.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	76
5.2.3	Pengujian Hipotesis.....	77
5.2.3.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi	77
5.2.3.2	Hasil Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	78
5.2.3.3	Hasil <i>Moderate Regression Analys</i>	80
BAB VI	PEMBAHASAN	84
6.1	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	84
6.1	Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	86
6.3	Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap ualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88
6.4	Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	90
BAB VII	PENUTUP	93
7.1	Kesimpulan	93
7.2	Implikasi	94
7.3	Keterbatasan Penelitian	96
7.4	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	46
4.2	Defenisi Operasional Variabel.....	52
5.1	Distribusi Kuesioner	59
5.2	Ringkasan Demografi Responden.....	60
5.3	Statistik Deskriptif.....	62
5.4	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan	64
5.5	<i>Rotated Component Matrix</i> untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan	66
5.6	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Setelah Tiga Indikator Dikeluarkan.....	67
5.7	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Setelah Tiga Indikator Dikeluarkan.....	67
5.8	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	68
5.9	<i>Rotated Component Matrix</i> untuk Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	68
5.10	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Peran Internal Audit.....	69
5.11	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Peran Internal Audit	69
5.12	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Peran Internal Audit Setelah Satu Indikator Dikeluarkan	70
5.13	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Peran Audit Internal setelah Satu Indikator Dikeluarkan	70
5.14	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	71
5.15	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal	71
5.16	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal Setelah Tiga Indikator Dikeluarkan.....	72
5.17	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal setelah Tiga Indikator Dikeluarkan	73

5.18	KMO dan <i>Barlett's test</i> untuk Variabel Komitmen Organisasi.....	73
5.19	<i>Component Matrix</i> untuk Variabel Komitmen Organisasi.....	73
5.20	Rekapitulasi Pengujian Reliabilitas.....	74
5.21	Hasil Uji Multikolinearitas	76
5.22	Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
5.23	Hasil Uji Determinasi.....	78
5.24	Hasil Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	78
5.25	Hasil Analisis Regresi Moderasi Sistem Pengendalian Internal antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	81
5.26	Hasil Analisis Regresi Moderasi Komitmen Organisasi antara Peran Internal Audit Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	82
5.27	Keterangan Hasil	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	37
3.2 Model Penelitian	44
5.1 Hasil Uji Normalitas.....	75
5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Teori	104
2. Kuesioner.....	111
3. Rekomendasi Izin Penelitian	116
4. Tabulasi Hasil Kuesioner.....	117
5. Hasil Olah Data.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena itu laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas serta mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan. Ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna memiliki makna bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi. Laporan keuangan akan berguna apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif. Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan dapat menjamin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai penggunaan dana yang dapat dikelola dengan baik serta akuntabel dan transparan (Palayukan, 2021).

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang diperiksa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah pusat/daerah dikatakan baik adalah jika memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan gambaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

dan juga opini WTP terhadap laporan keuangan dapat menaikkan tingkat keyakinan yang tinggi untuk mempercayai informasi LKPD.

BPK memberikan rilis terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada semester satu yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2021, mengungkapkan bahwa opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 70% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah daerah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (BPK, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari 541 LKPD tahun 2020 yang diperiksa BPK, sebanyak 55 LKPD memperoleh opini selain WTP yang disebabkan oleh terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung oleh bukti yang cukup.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dikutip dari kareba-toraja.com, Kabupaten Toraja Utara mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas prestasinya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hasil yang diperoleh pemerintah Toraja Utara diharapkan mampu untuk terus mendorong pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan yang baik serta berkualitas.

Salah satu dampak positif dari opini WTP dari sisi anggaran adalah didapatkannya bonus berupa Dana Insentif Daerah (DID) karena kemampuan mempertahankan WTP. Tetapi berdasarkan info rilis kementerian keuangan yang diinformasikan oleh Kareba Toraja menyatakan bahwa meskipun Toraja Utara

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Kabupaten Toraja Utara mendapatkan dana insentif daerah pada tahun 2021, hal tersebut dikarenakan status WTP pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah kategori B dengan nilai *passing grade* dibawah 76. Dalam rilis Kemenkeu, daerah yang mendapatkan alokasi dana insentif daerah yaitu daerah yang memenuhi kriteria utama dan paling sedikit mendapatkan nilai 76 dengan kategori B (baik). “Namun demikian, walaupun telah memenuhi kriteria utama, Kabupaten Toraja Utara mempunyai nilai di bawah ambang batas yang ditetapkan (*passing grade*) untuk kategori kinerja, yaitu B, serta tidak mendapatkan penghargaan/diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait, sehingga tidak mendapatkan alokasi dana insentif daerah tahun anggaran 2021”, tulis rilis Kementerian Keuangan yang dikutip dari laman UpdateKareba.com. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti karena berdasarkan informasi WTP yang diterima pemerintah Toraja Utara sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 disertai dengan bonus dana insentif daerah. Yang berarti bahwa terdapat penurunan kualitas laporan keuangan yang disajikan yang terbukti dengan penurunan penilaian yang diberikan oleh BPK yang berakibat pada tidak diterimanya dana insentif daerah.

Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Tujuan dari standar akuntansi pemerintahan yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan daerah harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP diberlakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul baik dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit dipemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang disusun dapat lebih berkualitas.

Beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Ikyarti (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma” menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sako *et al.* (2018), Yanti *et al.* (2020), Pujanira *et al.* (2017) dan Yusnita (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2020) yang berjudul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan” menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Jakarta Barat.

Peran internal audit pemerintah dalam melaksanakan pengawasan laporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat selaku auditor internal pemerintah, dilaksanakan dengan cara monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan SKPK dan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan ke BPK-RI. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada kepala daerah (Adrian, 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti *et al.* (2022) menyatakan bahwa jika peran auditor meningkat maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2019), Gamayuni *et al.* (2018), Goo *et al.* (2019), Handayani (2020) dan Permata (2022). Hasil yang

berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017), Triyanto (2019), dan Atika (2019) yang memberikan hasil bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mengawasi proses penganggaran dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sampai dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik dapat memberikan keyakinan bahwa semua proses yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir temuan pada saat dilakukannya pemeriksaan. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020 mengungkapkan 6.809 temuan yang memuat 5.367 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, yang meliputi 1.699 (32%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal (BPK, 2021). Berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh pengendalian internal secara langsung ataupun tidak langsung akan terpapar dalam laporan keuangan. Jika pengendalian internal suatu organisasi baik, maka akan baik pula yang hasil yang didapat, namun jika pengendalian internalnya buruk maka akan buruk pula hasilnya (Pebriani, 2019).

Penelitian sebelumnya tentang sistem pengendalian internal dilakukan oleh Langwo *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Banjarmasin. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2019). Hasil berbedah

ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Adhitama *et al.* (2019) dan Kapriana *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Komitmen organisasi merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang bersama-sama berkomitmen dalam pencapaian tujuan. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain membahas mengenai komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah dengan benar dan jelas (Yusnita, 2017). Keterlibatan individu yang berkomitmen dalam penyusunan laporan keuangan dapat ikut menentukan hasil yang diperoleh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.* (2020) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alminanda *et al.* (2018), Dariana *et al.*, Fathia (2020), dan Bala (2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa interaksi peran internal audit yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Siwambudi (2017), Murdayanti (2017) dan Triyanto (2019).

Penelitian yang paling menyerupai penelitian saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2020) yang berjudul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dalam pengolahan data, menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi, serta satu variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. *Agency Theory* merupakan teori utama yang digunakan oleh peneliti menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat diwujudkan pada semua entitas yang bersandar pada kontrak, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagai lembaga acuan perilaku partisipan. Sama halnya dengan entitas publik, hubungan keagenan dapat terjadi dalam suatu tatanan pemerintahan negara, terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi.

Dengan menggunakan variabel standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit sebagai variabel bebas, kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat dan menggunakan variabel sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang tidak digunakan pada penelitian sebelumnya, dengan alasan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi dapat memberikan dukungan bahwa standar akuntansi pemerintah telah diterapkan dengan baik dan auditor internal telah berperan dengan penuh tanggung jawab. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali karena

menurut peneliti *institutional theory* dan *stewardship theory* lebih dapat menjelaskan fenomena yang peneliti angkat dibandingkan dengan *agency theory*, dengan alasan bahwa teori keagenan tidak diperuntuhkan untuk sektor publik dikarenakan ideologi yang terkandung dalam teori ini adalah ideologi kapitalisme dengan menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai sesuatu yang lebih mendominasi. Damayanti (2009) menyatakan bahwa teori keagenan tidak tepat diaplikasikan dalam anggaran sektor pemerintahan, karena salah satu alat yang digunakan prinsipal untuk mengontrol agen adalah pemberian insentif. Insentif ini, umumnya diukur berdasarkan pencapaian laba, sementara organisasi pemerintahan tidak memiliki laba sebagai alat ukur kinerja. Bentuk lain insentif adalah kepemilikan saham perusahaan oleh agen, sementara pemerintahan bukan terdiri atas saham yang dapat diperjual belikan, dan atau diserahkan kepemilikannya pada segelintir orang. Organisasi ini adalah organisasi yang kepemilikannya bersifat kolektif dan tidak dimiliki oleh orang per orang. Legislatif bukan pemegang saham (*stockholder*) dan tidak bisa memberi insentif berupa saham kepada eksekutif (*agen*), bahkan rakyat sendiri tidak memiliki saham, dan karenanya tidak bisa menjual saham.

Institutional theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidak konsistenan dalam tampilan formal organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan *isomorphism*. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi,

karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (*homogenitas*). Teori ini berkaitan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus diterapkan oleh setiap organisasi pemerintahan dan diterima secara umum sebagai aturan yang baku. Selanjutnya penerapan sistem pengendalian internal juga harus lebih ditingkatkan, agar dalam penerapan standar akuntansi dapat terlaksana semaksimal mungkin untuk pencapaian tujuan organisasi.

Stewardship theory yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini berasumsi dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak jujur dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan organisasi. Teori ini dapat digunakan untuk melihat perilaku pengelola keuangan daerah terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan pemilik pemerintah daerah yaitu masyarakat (Asnida *et al.* 2018). Auditor selaku *steward* akan mengarahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Selanjutnya keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sifat individu dalam hal ini komitmen organisasi dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara serta inkonsistensi hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah.

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara ?
2. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara ?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara ?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara peran internal audit terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara.
3. Menguji dan menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah dalam memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara.
4. Menguji dan menganalisis komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh peran internal audit terhadap kualitas LKPD Kab. Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi teori *institutional* dan *stewardship* yang menjelaskan bahwa

pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward* wajib mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang ada dalam suatu organisasi termasuk di dalamnya memaparkan laporan keuangan yang berkualitas dengan menaati setiap peraturan dan regulasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan daerah terutama bagi mereka yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Toraja Utara yaitu semua kepala perangkat daerah, kepala sub bagian selaku pejabat penatausahaan keuangan, dan pegawai/staff keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara terutama bagi Bupati selaku kepala daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan lebih memperhatikan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit yang didukung oleh sistem pengendalian internal dan komitmen dari seluruh pegawai dari setiap perangkat daerah sehingga mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh perangkat daerah Toraja Utara yang berjumlah 28 perangkat daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menguji variabel standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit yang didukung oleh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan tesis dan disertasi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2013 sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu penting dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, ruang lingkup dan diakhiri dengan sistematika tesis.

Bab II tinjauan pustaka, bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan sekarang.

Bab III kerangka pemikiran dan hipotesis, bab ini berisi tentang kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dalam suatu kerangka pemikiran. Selanjutnya, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti.

Bab IV metode penelitian, bab ini berisi tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

Bab V hasil penelitian, bab ini berisi tentang deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi sistematik tentang data dan temuan yang diperoleh. Deskripsi hasil penelitian dapat berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Keterbatasan penelitian menguraikan hal-hal yang membatasi penelitian. Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para peneliti lain yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan (*institutional theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidak konsistenan dalam tampilan formal organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan *isomorphism*. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (*homogenitas*).

Institutional theory merupakan salah satu pendekatan dari bagian ilmu sosiologi yang mempelajari institusi dan organisasi (dua entitas yang dibedakan). Teori ini berusaha menjelaskan variasi dan kesamaan dari organisasi-organisasi dalam hal struktur dan perilaku seseorang, serta menentang suatu pandangan yang menyebutkan perkembangan organisasi hanyalah proses teknis untuk memperbaiki efisiensi sebagai konsekuensi dari rasionalitas aktor-aktor yang menjalankan organisasi tersebut (Nuriyani *et al.*, 2019).

Teori kelembagaan dalam suatu organisasi telah menempatkan lembaga sebagai inti dari analisis desain dan perilaku organisasi, dimana

organisasi dikatakan sebagai institusi lokal dari institusi yang lebih luas sebagai bentuk kepercayaan, aturan, dan norma yang diterima (Berthod, 2016). Institusi secara umum mampu mempengaruhi bentuk organisasi yang terlepas dari aliran sumber daya serta persyaratan teknis. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri atau *isomorphic* (sama di dalam tampilan namun berbeda di dalamnya) akibat adanya tekanan dari luar jika ingin bertahan hidup. Menurut Nazarudin dan Suseno (2017) organisasi dapat menyesuaikan diri ketika menjalani 3 proses, proses tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Coersive isomorphsim* yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan “paksaan”. Tekanan bisa datang dari pengaruh politik dan permasalahan legitimasi.
2. *Mimetic isomorphsim* yaitu proses dimana organisasi meniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang, meskipun organisasi yang meniru tidak mengetahui alasan pasti mengapa mereka meniru organisasi tersebut dan bukan karena dorongan efisien.
3. *Normative isomorphsim* sering diasosiasikan dengan profesionalisasi dan menangkap tekanan normatif yang muncul dibidang tertentu. Tekanan normative muncul dari kekuatan hukum atau intervensi pemerintah dari investor. Tekanan normative disini muncul karena kesadaran sendiri dari suatu organisasi untuk mengarah kepada hal yang lebih baik.

Pada penelitian ini peneliti akan berusaha menekankan pada *coersive isomorphism* yaitu tekanan eksternal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi dan *normative isomorphsim* yaitu tekanan yang terjadi karena adanya tuntutan organisasi profesional. Pada sektor pemerintahan terdapat standar akuntansi yang mengatur proses pelaporan keuangan secara teknis (Budiawan dan Purnomo, 2014). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur

praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*), sehingga hanya menekankan aspek positif agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi (Chodijah dan Hidayat, 2018).

2.1.2 Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menyatakan bahwa setiap manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada pencapaian sasaran hasil utama mereka yaitu kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Keinginan *principal* dalam hal ini masyarakat merupakan hal mutlak yang menjadi tujuan dari manajemen, meskipun dalam pelaksanaannya manajemen mendapat manfaat. Hal inilah yang memacu para *steward* yaitu manajemen dan setiap pihak yang terlibat untuk tetap memberikan kontribusi terbaik dan tidak meninggalkan jalur organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Podrug (2011) *stewardship theory* yang sering disebut teori pengelolaan atau penatalayanan memiliki beberapa asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*). Beberapa pertimbangan dalam penggunaan teori *stewardship* antaranya adalah :

1. Manajemen sebagai *steward* yaitu pelayan, penerima amanah atau pengelola. Teori ini memandang bahwa pemerintah selaku *steward* akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.
2. Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi. Teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi

dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji kondisi manajemen sebagai *steward* dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi.

3. Model manusia, perilaku kolektif dan kepentingan organisasi. *Model of man* pada *stewardship* didasarkan pada *steward* yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, memiliki utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* untuk bertindak kooperatif. Kepentingan antara *steward* dan *principal* tidaklah sama, tetapi *steward* akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap rasional dan dapat diterima.
4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan *principal*. Teori ini menggambarkan bahwa situasi para pemimpin tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi, sehingga manajemen bertindak sesuai keinginan *principal*.
5. Kepentingan manajer dan *principal* adalah konvergensi. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan *principal* adalah konvergen artinya keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu kepentingan organisasi. Jika kepentingan organisasi terpenuhi maka kepentingan individu juga akan terpenuhi.
6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan. Teori ini menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan.
7. Sikap pemilik mempertimbangkan risiko. Teori *stewardship* cenderung mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi untuk menghasilkan kinerja yang baik.
8. Hubungan *principal* dan manajemen saling percaya. Teori *stewardship* dibangun dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia

pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan antara *principal* dan manajemen.

Dalam penelitian ini, teori ini berkaitan dengan variabel kualitas laporan keuangan, peran internal audit dan komitmen organisasi. Dimana *stewardship theory* memberikan suatu gagasan bahwa keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi perilaku dan sifat setiap individu dalam mencapai sasaran tujuan pemerintah dalam segala aspek meskipun dengan mengesampingkan kepentingan atau ego pribadi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya pengaruh dengan intensitas tinggi antara kepuasan atas pelayanan publik dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* berpandangan bahwa terdapat peran kuat pada sinergitas dan integrasi pada perilaku dan sifat individu terhadap tujuan pemerintah sehingga memacu *stakeholder* untuk memaksimalkan peningkatan kompetensi setiap individu dalam memberi pelayanan yang utama kepada publik dengan cara meningkatkan peran internal audit yang bekerja semaksimal mungkin serta didukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan *good governance* (Gulo, 2021).

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan adalah penyajian akhir dari prosedur akuntansi yang dilakukan organisasi dalam bentuk pengungkapan (Gulo, 2021). Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaporan entitas. Adapun menurut Ratmono dan Sholihin (2017) laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna dan untuk alokasi sumber daya yang dipercayakan.

Adapun kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Yadiati dan Mubarak (2017) kualitas laporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yaitu laporan yang berisi ringkasan transaksi keuangan pemerintah yang memberikan informasi mengenai keuangan suatu entitas sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang sesuai dengan kadar tertentu yaitu standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik kualitas laporan keuangan maka informasi suatu entitas akan terefleksikan dengan baik dalam laporan keuangan tersebut, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan

akuntabilitas atas pengelolaan keuangan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia antara lain yakni.

1. Relevan

Yaitu informasi yang disajikan dapat memberi gambaran dalam upaya pengambilan keputusan oleh pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa saat ini, masa lalu dan masa mendatang, dan juga dapat mengoreksi peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur sebagai berikut.

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan untuk pengguna dapat mempertegas dan mengoreksi apa yang terjadi dimasa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi digunakan untuk membantu pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang, dengan melihat dari yang terjadi dimasa lalu dan saat ini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan tepat pada waktunya sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu berisi semua informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pengungkapan yang lengkap maka tidak akan terjadi kekeliruan dalam penggunaannya.

2. Andal

Yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang mungkin dapat menyesatkan dan kesalahan material, penyajian

setiap transaksi dilakukan dengan jujur, dan dapat dibuktikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut.

- a. Jujur, yaitu informasi disajikan secara wajar sesuai dengan harapan dalam penyajian.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, walaupun pengujian dilakukan berkali-kali oleh pihak yang berbeda, tetapi hasilnya tidak akan berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi yang disajikan diutamakan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Yaitu informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain yang setara.

4. Dapat Dipahami

Yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah dan jelas oleh pengguna sesuai dengan pemahaman pengguna laporan.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Menurut Rusmana *et al.* (2017) standar akuntansi pemerintahan adalah konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis

transaksi keuangan pemerintah yang telah dipilih dan ditetapkan oleh badan/lembaga yang berwenang untuk menyusun standar dan selanjutnya dimodifikasi menjadi standar. Adrian (2019) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan harus diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah. Ariawan *et al.* (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan SAP yang berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun pemerintahan daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang diharapkan dapat menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan negara agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Dariana laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun para pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip

akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hal yang perlu dipahami dan dipatuhi dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan akuntansi yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah berbentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama dengan laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk untuk pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Nilai Historis

Nilai historis berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayarkan. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain disebabkan karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan lebih mudah.

3. Prinsip Realisasi

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi sehingga dapat digunakan

untuk berbagai kepentingan. Biasanya dapat digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harus disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Prinsip Periodesitas

Agar dapat mengukur kinerja entitas dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dapat juga dalam periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Prinsip Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terdapat perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar awal laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat dibutuhkan bagi penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.5 Peran Audit Pemerintah

The Institute of Internal Auditors (IIA) mengemukakan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan asuransi serta konsultasi yang memiliki sifat mandiri dan obyektif, yang dirancang untuk memaksimalkan *value* serta mengubah operasional perusahaan menjadi lebih baik dengan pendekatan sistematis menggunakan cara evaluasi, serta memaksimalkan kinerja manajemen risiko, pengelolaan pengendalian, dan proses pengelolaan perusahaan. Kedudukan auditor internal dalam sebuah perusahaan mempunyai peranan penting untuk mempengaruhi semua aktivitas atau kegiatan operasi perusahaan. Semakin tinggi peran pekerjaan yang dilakukan oleh seorang auditor maka akan semakin tinggi penilaian yang dilakukan oleh auditor internal untuk mengoptimalkan kegiatan operasi perusahaan (Suginam, 2017).

Menurut Arief (2016) audit internal adalah elemen pemantauan pengendalian internal dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mengawasi seberapa efektif unsur-unsur pengendalian internal lainnya. Audit internal juga sebagai sarana evaluasi internal untuk menyelidiki dan mengukur sebuah kegiatan perusahaan dan dapat memberi saran kepada pengelola untuk memaksimalkan efektivitas perusahaan. Audit internal dirancang untuk memungkinkan semua komponen perusahaan melakukan tugas secara baik dan efisien. Audit internal memberikan evaluasi, pandangan, atau saran yang berguna bagi semua departemen. Membantu anggota organisasi menjalankan tugasnya secara efektif merupakan tujuan dilakukannya audit internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dikatakan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, BPK sebagai badan pemeriksa keuangan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah untuk membantu dalam mempermudah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.

Yang berperan sebagai auditor internal adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. Dibentuknya lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Fungsi aparat pengawasan internal pemerintah yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk

menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah di waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah terutama dari hasil revidi atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian internal. Aparat pengawasan internal pemerintah yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Inspektorat memiliki peranan dalam melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat tercipta pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Adrian (2019) sistem pengendalian internal pemerintah, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian yang digunakan dalam mencapai sasaran dan

menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Hia (2020) sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sistem yang dirancang oleh pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka untuk tercapainya efektivitas standar akuntansi pemerintah diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai. Sistem pengendalian internal yang memadai dapat mencegah terjadinya berbagai kecurangan dipemerintahan. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal. Pengendalian internal diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian internal disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah meliputi.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku kondusif untuk mendukung sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup: a) Penegakan integritas dan nilai etika; b) Komitmen terhadap kompetensi; c) Kepemimpinan yang kondusif; d)

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya; g) Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif; h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah dan kebijakan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas: a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; b) Pembinaan sumber daya manusia; c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d) Pengendalian fisik atas aset;

e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f) Pemisahan fungsi; g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i) Pebatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya; j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal dan transaksi atas kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang telah ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diseleggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan pengendalian internal pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian internal dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer (1990) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan karyawan untuk tetap bekerja dengan organisasi mereka. Komitmen

organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Menurut Dalia (2022) komitmen organisasi yaitu setiap karyawan memiliki tekad dan keinginan kuat untuk tetap mempertahankan kualitas kinerja suatu organisasi sehingga tetap eksis dan mempertahankan agar organisasi sektor publik tersebut tetap menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Widari dan Sutrisno (2017) menyatakan bahwa komitmen adalah pengenalan yang kuat dari individu dalam organisasi tertentu dan berpihak pada organisasi serta secara aktif terlibat dan berkontribusi pada organisasi. Sedangkan Arif (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi di mana individu memihak organisasi tertentu serta bertujuan untuk tetap mempertahankan keanggotaannya pada sebuah organisasi. Dan menurut Tampubolon dan Hasibuan (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan ketersediaan seseorang untuk bekerja dan terlibat dalam organisasi. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukerala termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan.

Allen dan Meyer (1990) mencoba untuk mengintegrasikan berbagai definisi komitmen tersebut dengan membuat model komitmen yang terdiri tiga komponen, yaitu.

1. Komitmen efektif (*Affective commitment*), yaitu keterikatan karyawan secara psikologis kepada organisasi yang bersifat positif. Artinya bahwa karyawan tersebut menghubungkan dirinya dengan tujuan organisasi dan tetap ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut.
2. Komitmen berkelanjutan (*Continuance commitment*), yaitu suatu komitmen yang mengharuskan seseorang untuk tetap menjadi anggota organisasi dengan alasan bahwa biaya yang harus ditanggung (baik *economic cost* maupun *social cost*) lebih tinggi jika dia keluar dari organisasi (*side bet theory*).
3. Komitmen normative (*Normative commitment*), komitmen individual untuk tetap menjadi anggota organisasi, lebih karena adanya suatu kewajiban moral. Sebagai contoh ketika sebuah organisasi telah memberikan pelatihan ataupun investasi dalam pengembangan sumber daya manusia anggota organisasinya maka anggota organisasi tersebut cenderung merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap menjadi anggota organisasi dalam rangka membayar hutang. Jadi anggota organisasi berkomitmen terhadap organisasi karena merasa sudah seharusnya memiliki komitmen tersebut.

2.2 Tinjauan Empiris

Dewi *et al.* (2020) dengan judul penelitian *The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Menggunakan *Agency Theory* dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan melakukan penelitian pada 34 SKPD Administrasi Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dikarenakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan suatu daerah merupakan komitmen yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai sistem pengendalian internal maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan sesuai dengan target dan juga penerapan teknologi informasi salah satu faktor yang mendukung dalam hal pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Triyanto (2019) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Hasil ini menggambarkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di satuan kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja Badan Pusat Statistik

Se-Provinsi Banten. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga ada tidaknya komitmen organisasi tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat maupun daerah.

Astuti (2022) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan SIA, SPI dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Indojaya Group. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, peran serta auditor internal pada kualitas laporan keuangan Indojaya Group. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan grup Indojaya yang berprofesi sebagai akuntan yang berjumlah 37 karyawan dan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Pengambilan data menggunakan metode kuesioner yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil penelitian memperlihatkan penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal serta peran audit internal memberikan pengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Pebriani (2019) melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda

dengan pengujian variabel moderasi menggunakan moderated regression analysis dan pengolahan data menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD, namun secara parsial penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian secara moderasi variabel peran audit internal yang dimoderasi oleh SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.